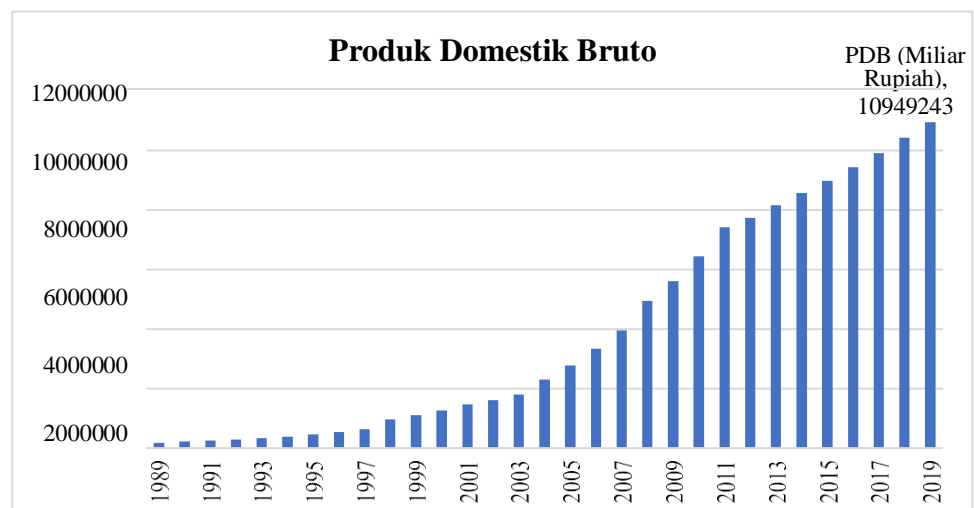


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang signifikan dalam perkembangan ekonomi di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan ekonomi suatu negara dalam menghasilkan pendapatan tambahan pada jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan secara umum kegiatan ekonomi merupakan mekanisme dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi guna menciptakan sebuah output dan proses produksi tersebut dihitung berdasarkan nilai PDB. Sebagai negara berkembang, Indonesia berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan nilai PDB guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, tercapainya pembangunan nasional akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga nilai PDB mengalami eskalasi. Berikut ini nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 1989-2019 (Miliar Rupiah):

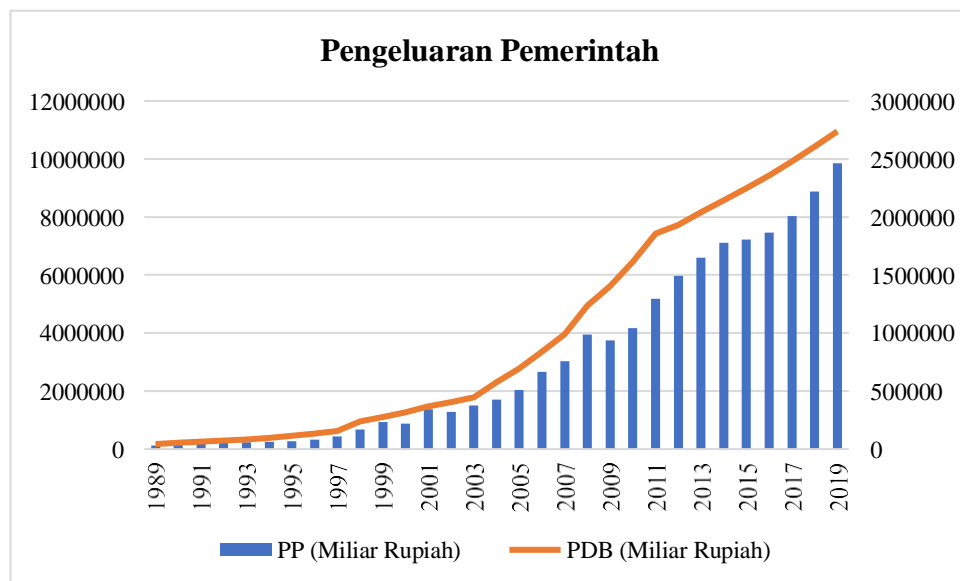


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Grafik Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1989-2019 (Miliar Rupiah)

Dari gambar yang disajikan, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tiap tahunnya mengalami peningkatan dan relatif stabil karena terdapat peningkatan konsumsi rumah tangga, daya beli konsumen, dan perubahan harga komoditas. Akan tetapi peningkatan yang stabil tersebut masih dalam kategori kelas menengah sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan guna mencapai target peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dikarenakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah dan diimplementasikan di masyarakat. Kebijakan publik tersebut dibuat salah satunya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada negara dengan tujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan di Indonesia ialah kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah dalam memelihara kestabilan ekonomi. Hal ini selaras dengan teori yang diutarakan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes dimana dengan adanya keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dapat memaksimalkan pembangunan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, Keynes menegaskan bahwa dibutuhkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik dalam menjaga stabilitas harga. Dengan adanya intervensi pemerintah tersebut memungkinkan aktivitas produksi terus berlanjut dalam menciptakan pasokan produk yang melimpah indikator Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat (Wapshott, 1936).

Instrumen pokok pada kebijakan fiskal yang digunakan untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Bruto ialah pengeluaran pemerintah dan tarif pajak. Pemerintah harus dapat mengatur pengalokasian sumber pendanaan negara, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran tersebut dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, salah satunya ialah pembangunan nasional seperti infrastruktur dimana dengan adanya infrastruktur tersebut akan tercipta efek berganda (*multiplier effect*) pada peningkatan produktivitas perekonomian yang mana akan mendorong PDB. Berikut nilai pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 1989-2019 (Miliar Rupiah):



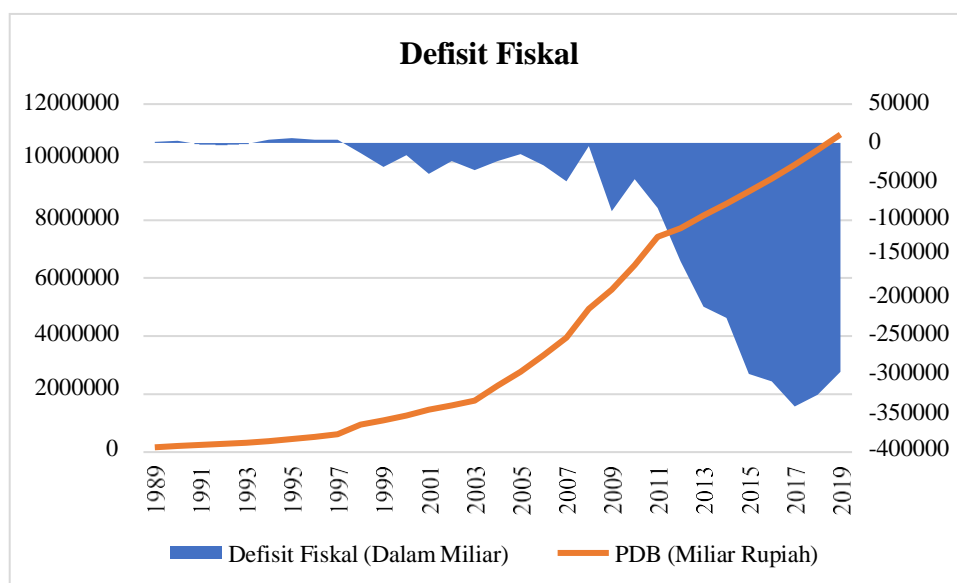
Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 2. Grafik Nilai Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1989-2019 (Miliar Rupiah)

Sekilas jika dilihat pada gambar diatas, meningkatnya pengeluaran pemerintah diiringi dengan meningkatnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini selaras dengan Teori Keynesian dimana dalam meningkatkan nilai PDB dibutuhkan intervensi pemerintah melalui sebuah kebijakan, salah satunya ialah kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah timbulnya defisit fiskal pada anggaran negara sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan penerimaan dalam negeri. Defisit fiskal yang terlalu besar akan mempengaruhi berbagai indikator makro, seperti inflasi, suku bunga, konsumsi dan tabungan hingga menurunkan investasi.

Terbatasnya pendapatan dalam negeri, membuat pemerintah mengandalkan pinjaman luar negeri guna menutupi tingginya anggaran negara tersebut serta meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar tercapainya target

pertumbuhan. Selain mengandalkan pendapatan luar negeri, besaran defisit dapat diminimalisir dengan melakukan pembatasan biaya program tertentu, seperti program yang tidak berdampak pada peningkatan pajak dan devisa serta mengurangi pembangunan negara yang kurang produktif agar naiknya nilai defisit fiskal dapat meningkatkan nilai PDB. Berikut nilai defisit fiskal Indonesia pada tahun 1989-2019 (Miliar Rupiah):



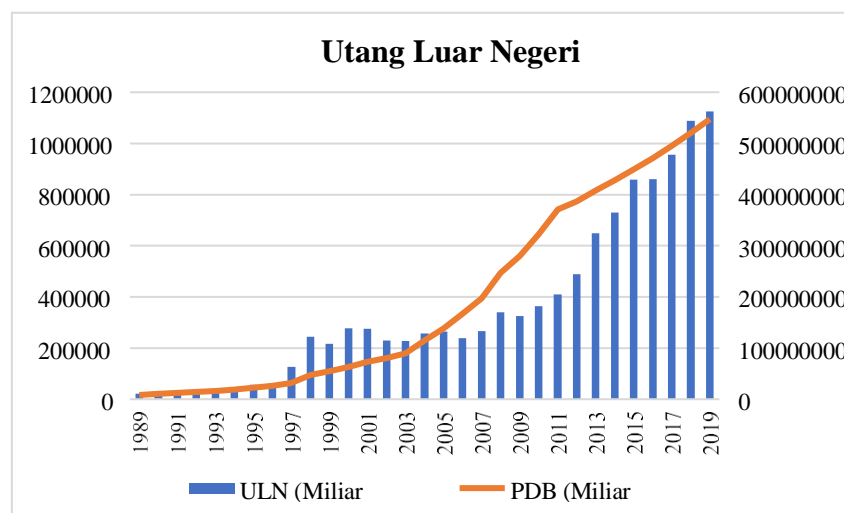
Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 3. Grafik Nilai Defisit Fiskal Indonesia Tahun 1989-2019 (Miliar Rupiah)

Menurut data Kementerian Keuangan, nilai defisit fiskal berfluktuatif dan cenderung meningkat dimana nilai PDB selama tiga puluh tahun terakhir mengalami peningkatan. Tingginya nilai PDB disebabkan oleh meningkatnya pendapatan luar negeri dalam bentuk utang luar negeri yang digunakan untuk menutupi besarnya defisit fiskal serta melaksanakan pembangunan nasional yang ada pada negara sehingga nilai PDB tetap meningkat (Swasono & Martawardaya, 2016).

Keterbatasan pendapatan dari sumber dalam negeri menuntut pemerintah untuk mengandalkan utang luar negeri untuk memperoleh pendapatan dari luar

negeri sebagai langkah stimulus ekonomi, dimana utang digunakan untuk menutup defisit dan mendorong pembangunan nasional, sehingga meningkatkan permintaan agregat dan berdampak pada tingginya nilai PDB. Utang luar negeri dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan bertambahnya beban pengeluaran pemerintah serta beban ketergantungan negara terhadap bantuan asing. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengupayakan dengan adanya kebijakan perihal dibatasinya pinjaman dimana penggunaan utang hanya dilakukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang produktif serta bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara. Selain itu, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan dalam penggunaan utang luar negeri dengan cara melakukan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan pada gambar 4 di bawah ini menunjukkan bahwa tingginya utang luar negeri dan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren meningkat pada tahun 1989-2019.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4. Grafik Nilai Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1989-2019 (Miliar Rupiah)

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dikarenakan peneliti ingin melihat pengaruh pengeluaran pemerintah, defisit fiskal dan utang luar negeri

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan periode yang lama yaitu pada tahun 1989-2019. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sem Rantebua, Rosnawintang dan La Ode Suriadi pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” menyatakan bahwa Belanja Negara memiliki hubungan yang positif. Penelitian yang dilakukan oleh Matthew Kofi Ocran pada tahun 2010 dengan judul “Fiscal Policy and Economic Growth in South Africa” menyatakan bahwa fiscal deficit tidak memiliki hubungan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Bongumusa Prince Makhoba, Irrshad Kaseeram dan Lorraine Greyling pada tahun 2019 dengan judul “Assessing The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in South Africa” menyatakan bahwa Public Debt tidak memiliki hubungan yang signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini diharapkan menjadi titik terang dari perbedaan pengasumsian yang ada seperti masalah diatas.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah: **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Utang Luar Negeri, Defisit Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 1989-2019”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, ditemukan bahwa salah satu indikator dalam menentukan pertumbuhan perekonomian dilihat dari pembangunan nasional yang ada di suatu negara. Dalam merealisasikan pembangunan nasional terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan salah satunya ialah sumber pendanaan yang dilihat dari utang luar negeri dan pengalokasian sumber dana yang sudah dimiliki yang dilihat dari pengeluaran pemerintah dan defisit fiskal, apabila sumber pendanaan dalam merealisasikan pembangunan terbatas, dan pengalokasian sumber dana tidak dialokasikan secara baik maka akan menimbulkan permasalahan pada negara seperti bergantungnya Indonesia dengan negara lain, besar beban bunga, suku bunga tinggi, investasi menurun hingga berujung timbulnya inflasi yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian sehingga dibutuhkan

intervensi pemerintah agar perekonomian stabil. Dari penjelasan yang ada, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 1989-2019?
- b. Bagaimana pengaruh Defisit Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 1989-2019?
- c. Bagaimana pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 1989-2019?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang sudah diterangkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 1989-2019.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Defisit Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 1989-2019.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 1989-2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Bersumber pada tujuan penelitian yang ada, maka diperoleh harapan dari hasil yang memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi guna memperbanyak pengetahuan seputar pengaruh pengeluaran pemerintah, defisit fiskal dan utang luar negeri terhadap produk domestik bruto serta kebijakan fiskal yang tepat di Indonesia.
 - 2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai penambah wawasan

mengenai berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk bahan evaluasi dan gambaran mengenai pengimplementasian kebijakan fiskal untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, defisit fiskal dan utang luar negeri terhadap produk domestik bruto di Indonesia.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk peneliti berikutnya mengenai pemilihan kebijakan fiskal yang ada.